



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDURROCHMAN INDRA JAYA SUKMA**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **404294**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.800.000.000**

1. Tanah Seluas 568 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , LAINNYA Rp. 1.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **7.100.001**

1. LAINNYA, POLYGON BMX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1
2. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 ABS Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. LAINNYA, EXOTIC BMX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **123.879.812**

D. SURAT BERHARGA Rp. **52.539.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **17.003.849**

F. HARTA LAINNYA Rp. **350.000.000**

Sub Total Rp. **3.350.522.662**

III. HUTANG Rp. **712.137.816**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.638.384.846**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.